

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan sektor publik pada akhir-akhir ini, mampu mendorong kuatnya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada instansi-instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Instansi pemerintah dituntut untuk transparansi kepada masyarakat atau publik dalam pengelolaan keuangan. Instansi pemerintah supaya mampu memberikan informasi pada masyarakat berdasarkan pemenuhan hak-hak publik (Iqbal, 2017). Kurangnya pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat menyebabkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah masih belum memihak pada publik.

Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang berupa laporan tahunan selama ini belum sepenuhnya memuat informasi yang relevan sesuai kebutuhan. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi laporan keuangan seperti investor, masyarakat umum belum mampu mengakses informasi laporan keuangan daerah secara mudah, sehingga hal ini menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah (Iqbal, 2017). Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Sesuai peraturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8, tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah daerah memberikan informasi dari laporan keuangan tersebut kepada pihak lain. Hal ini sebagai

bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini juga dapat dilihat dari peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas jika memuat informasi yang disampaikan relevan, memiliki kehandalan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Mokoginta dkk, 2017).

Kualitas laporan keuangan yang relevan yaitu laporan keuangan yang informasinya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan membantu pengguna melakukan evaluasi peristiwa saat ini dan masa yang akan datang dan dapat digunakan untuk meramalkan masa yang akan datang (Hafiz, 2014). Selain itu laporan keuangan yang relevan dapat digunakan untuk menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu. Laporan keuangan memiliki kualitas yang handal jika informasi yang disampaikan bebas dari kesalahan pemahaman atau penafsiran yang menyesatkan, kesalahan material, adanya kejujuran dari fakta yang ada, serta dapat diverifikasi. Informasi laporan keuangan yang relevan jika tidak diiringi dengan kehandalan laporan keuangan itu sendiri, maka informasi tersebut berpotensi menyesatkan (Harlinda, 2016).

Laporan keuangan dikatakan dapat dibandingkan jika informasi yang termuat dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Sedangkan laporan keuangan yang dapat dipahami, yaitu laporan keuangan yang memiliki informasi yang mudah dipahami pengguna baik bentuk dan istilah yang ada dalam laporan keuangan. Hal ini menuntut laporan keuangan harus memiliki istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang cukup atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan,

sehingga perlu adanya pengguna untuk mempelajari informasi tersebut (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, secara transparansi dan akuntabel (Hadi, 2017). Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka setiap daerah berwenang mengelola keuangannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam mengatur dan mengurus kewajiban daerah sesuai peraturan purundang-undangan dikatakan otonomi daerah. Otonomi daerah yang sudah berjalan selama ini mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri, sehingga memiliki konsekuensi pertanggungjawaban atas laporan keuangan daerah, sebagai wujud pertanggungjawaban daerah atas anggaran belanja daerah (Purba & Tarigan, 2021).

Otonomi daerah sebagai perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini memiliki konsekuensi akan kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik sering disebut juga dengan *good governance* sesuai dengan yang disepakati oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) adalah salah satu fungsi dan tanggung jawab dari suatu pemerintahan. Salah satu dari indikator dari tata kelola pemerintahan yang baik ialah transparansi informasi kepada masyarakat, salah satunya adalah transparansi informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan (Putra, dkk, 2021). Faktor-faktor yang bisa mendukung dalam transparansi informasi keuangan yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal , dan komitmen organisasi.

Dalam *Al-qur'an* telah disampaikan kepada manusia untuk wajib menyampaikan amanah kepada orang yang telah menitipkan amanah nya, tercatat dalam *Qur'an* surat *An-nisa'* ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa’: 58).

Berdasarkan ayat di atas bahwa kita sebagai umat islam harus menyampaikan amanah yang telah diberikan dan menjaganya dengan baik dan benar. Jika kita sebagai umat islam tidak menyampaikan dan menjaga amanah yang sudah di berikan maka kita akan mendapat pahala dari Allah SWT. Amanah ini diberikan oleh orang-orang yang memang tugas keuangan, sehingga baik dan burunya laporan keuangan tergantung pada kompotensu sumber daya manusia yang sadar akan tugas dan pekerjaanya adalah amanah yang harus di kerjakan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Samosir & Setiyawati, (2019) berpendapat bahwa laporan keuangan yang berkualitas dapat dipengaruhi adanya sumber daya manusia yang berkompten. Sumber daya manusia yang berkompten yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidangnya, dalam hal ini adalah keuangan baik tingkat individu, organisasi/lembaga dan sistem dalam menjalankan fungsi dan wewenang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Terjadinya kendala-kendala pengelolaan keuangan serta penyampaian laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah disebabkan adanya rendahnya kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintah daerah (Gaspersz, 2019). Untuk dapat

menghasilkan pengelolaan keuangan sesuai harapan semua masyarakat dan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memiliki kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola keuangan secara akuntabel. Kunci kesuksesan pengelolaan keuangan daerah adalah kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah daerah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan lebih siap dalam melaksanakan otonomi daerah, hal ini karena sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan pada bidang keuangan akan memiliki Kompetensi tinggi yang mampu memberikan informasi laporan keuangan secara berkualitas (Safiri & Zulkarnain, 2021).

Peneliti Yohanes (2019), Purba, dkk (2021), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sumber daya manusia yang berkompeten pada bidangnya maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara positif. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Putra, dkk (2021) yang menyatakan Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Organisasi/Instansi tidak bisa lepas dari kebutuhan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi perusahaan atau organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan (Putra, dkk, 2021). Sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi merupakan investasi yang tidak terwujud. Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Sumber daya manusia dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau lembaga memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Putra, dkk, 2021). Selain kompetensi sumber daya manusia, teknologi juga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi merupakan upaya untuk mengolah data, memproses, menyusun, menyimpan, mendapatkan, memanipulasi data, dalam beberapa cara yang memiliki tujuan supaya diharapkan mendapatkan hasil informasi berkualitas, informasi relevan, akurat, dan tepat waktu (Gaspersz, 2019). Dalam implikasinya pemanfaatan teknologi dapat digunakan untuk urusan pribadi, bisnis, hingga pemerintah untuk mengolah data keuangan. Dalam mendukung teknologi informasi itu sendiri untuk pemrosesan dan penyimpanan dibutuhkan komputer, database, jaringan, dan lain-lain yang di butuhkan untuk pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi yang baik harus didukung juga dengan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik sehingga menimbulkan perpaduan yang baik untuk organisasi (Samosir & Setiyawati, 2019).

Peneliti Yohanes (2019), Purba, dkk (2021), menyatakan bahwa kecanggihan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik menggunakan teknologi informasi maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara positif. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Putra, dkk (2021) yang menyatakan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian internal juga penting untuk dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal digunakan untuk meneliti tingkat ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sistem pengendalian internal akuntansi dikatakan baik apabila resiko proses pencatatan laporan keuangan terhindar dari kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau

perhitungan (Harlinda, 2016). Hal ini akan dapat mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Kelemahan pada sistem pengendalian internal dalam organisasi akan menyebabkan kesalahan-kesalahan dan resiko pada manajemen keuangan dalam organisasi. Hal ini didukung oleh pendapat Safiri & Zulkarnain, (2021) bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu satau kesatuan kejadian atau serangkaian tindakan yang mempengaruhi keseluruhan aktivitas organisasi. Pengendalian internal harus melekat pada manajemen pada organisasi yang menjalankan kegiatan perusahaan sehingga dapat memberikan jaminan kelayakan (*reasonable assurance*) untuk perusahaan dalam menemukan kesalahan dan mencegah resiko.

Kemanfaatan teknologi mampu memiliki keefektifan jika sumber daya manusia yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan memiliki motivasi untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. Sumber daya manusia harus dapat memahami, menggunakan dan mengaplikasikan teknologi informasi yang tersedia, guna dapat digunakan sebagai pengambil keputusan (Purba, & Tarigan, 2021). Kegiatan penyusunan laporan keuangan, jika memiliki kompetensi sumber daya manusia dan motivasi individu yang tinggi, maka sumber daya manusia tersebut akan merasa senang dalam bekerja, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya akan menggunakan segala pengetahuan, pengalaman dan pemahamannya tentang ilmu akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan Keuangan telah banyak dilakukan, seperti Purba et al., (2021) yang menghubungkan variabel kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi pada kualitas laporan keuangan. Hasil temuan menunjukkan

bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Putra, Kusuma, & Dewi, (2021), dalam penelitian dengan variabel yang hampir sama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan pada laporan keuangan yang berkualitas. Pada variabel kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan. Pengaruh kecanggihan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan tidak dimoderasi komitmen organisasi. Hal juga pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan juga tidak dapat dimoderasi komitmen organisasi. Pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan juga tidak dimoderasi komitmen organisasi. Menurut Safiri & Zulkarnain, (2021), menyatakan sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut Pasal 120 UU No.32 tahun 2004 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah dari suatu pemerintah daerah yang bertujuan sebagai pusat pertanggung jawaban atas jalannya suatu pemerintah daerah dan pembangunan daerah. SKPD dipimpin oleh kepala satuan kerja. Pemerintahan yang baik harus memiliki tata kelola pemerintahan yang baik juga karena tata kelola pemerintah yang baik itu penting bagi kesejahteraan sosial. Hal ini tidak seperti kasus yang dialami mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) proyek pembangunan apartemen

Royal Kedhaton yang berada di kawasan Malioboro yang termasuk dalam wilayah cagar budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta. Selain kasus tersebut ada kasus lainnya di kota Yogyakarta yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan Dirut PT Permata Nirwana Nusantara, Heri Sukamto atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. (*Tempo.com*, 2022). Fenomena lain dari pernyataan-pernyataan yang dimuat di webset Kementarian Keuangan. Pernyataan Meteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pengungkapan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk lembaga atau instansi itu hanyalah sebagai tanda bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan pernyataan itu maka predikat WTP tidak menjamin tidak adanya kasus korupsi atau penyimpangan lainnya dalam bentuk pemborosan anggaran.

Hal tersebut dibuktikan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2022 dinyatakan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY. Perolehan tersebut sekaligus menandai Pemkot Yogyakarta meraih predikat opini WTP untuk ke-14 kali berturut-turut, dan memiliki peroleh predikat WTP terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi dengan predikat tersebut DIY masih juga terjadi kebocoran keuangan dengan adanya korupsi seperti kasus di atas dan masih terjadinya pemborosan anggaran. Hal ini menjadikan alasan peneliti mengambil obyek di DIY, karena adanya perolehan predikat WTP terbanyak.

Berdasarkan *gap reseach* beberapa peneliti sebelumnya, maka terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang ditulis oleh Putra et al., (2021) yang

berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi” adapun penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang terdapat pada obyek yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya menggunakan obyek pada Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, sedangkan pada penelitian ini menggunakan obyek pada SKPD Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini karena adanya fenomena DIY khususnya Kota Yogyakarta yang memiliki predikat WTP 14 kali berturut-turut. Penulis menambahkan variabel moderasi yaitu motivasi. Penelitian sebelumnya menguji komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (Putra et al., 2021)

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis sampaikan tersebut dan penelitian terdahulu Putra et al., (2021) sebagai referensi utama, penulis tertarik untuk melakukan penelitian replikasi mengenai peran kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan motivasi sebagai variabel moderasi, hal ini karena motivasi diduga dapat memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, serta mengubah obyek penelitian. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penulis menentukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Motivasi Sebagai Variabel Moderating”**.

Motivasi penelitian ini adalah masih terdapat perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga belum ada yang meneliti di DIY. Maka penulis tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut, maka penulis mengemukakan beberapa masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Pengendalian Internal al berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Motivasi dapat memoderasi hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah Motivasi dapat memoderasi hubungan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
6. Apakah Motivasi dapat memoderasi hubungan Pengendalian Internal al dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menguji pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Untuk menguji pengaruh Pengendalian Internal al terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk menguji apakah Motivasi dapat memoderasi hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Untuk menguji apakah Motivasi dapat memoderasi hubungan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6. Untuk menguji apakah Motivasi dapat memoderasi hubungan Pengendalian Internal al dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam Pembahasan ini dapat dikemukakan dalam dua sisi yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pada apertur akuntansi sektor publik terkait kualitas laporan keuangan dengan poin penting pada kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, pengendalian internal al, dan motivasi.
- b. Bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada kualitas laporan keuangan pada SKPD pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

a. Bagi SKPD DIY

Menjadi referensi agar mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada SKPD DIY.

b. Bagi Pengambil Kebijakan di Pemda

Bagi pengambil kebijakan di pemda, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di pemda untuk mencermati faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan supaya dapat menjaga konsistensi dan kualitas laporan keuangan itu sendiri.